

INDONESIA 2022

WORLD STAFFS CHAMPIONSHIP EXHIBITION
JAKARTA, 4-9 AUGUST 2022



Parlementaria

Nomor 1212/III/VIII/2022 • Agustus 2022



Forum Filatelis Internasional untuk Membangun Dunia yang Bergandeng Tangan



3 Indonesia Juara
Umum ASEAN
Para Games 2022,
Puan Maharani:
Terima Kasih
Pahlawan Olahraga



4 Kasus DBD Melonjak
Muhaimin Iskandar
Minta Pemerintah
Optimalkan
Pelayanan Kesehatan



9 772614 339005



Forum Filatelis Internasional untuk Membangun Dunia yang Bergandengan Tangan

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dalam acara Pameran Filateli Dunia, 'World Stamp Championship & Exhibition Indonesia 2002' menyampaikan, para filatelis adalah para pecinta sejarah dan peradaban. Prangko adalah jendela, bahkan teropong untuk melihat ke belakang atau masa lalu. Dari prangko, seseorang akan dibawa ke semesta yang luas. Para penikmatnya bisa belajar dan mengkaji tentang sesuatu.

Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu, melalui prangko bisa berefleksi ke masa sekarang dan masa depan. Dia pun menyinggung kondisi dunia saat ini yang dihadapkan pada perkembangan geopolitik global yang diwarnai konflik yang menduplikasi era Perang Dingin, padahal dunia belum lepas dari pandemi Covid-19 yang membuat dunia mengalami kemandegan. Baginya, forum filatelis internasional bisa berperan untuk membangun dunia yang bergandengan tangan.

Gobel memaparkan hal-hal tersebut sebagai bentuk tantangan pada kaum filatelis untuk merancang perangko yang *up to date* dengan situasi tersebut. Namun, pesan kuat yang disampaikan Gobel dalam sambutannya adalah, relasi personal, seperti melalui forum filatelis internasional ini, akan tercipta pula hubungan dari hati ke hati. Dia mengajak untuk membangun

hubungan dari dasar hati, bukan dari dorongan kepentingan dan keuntungan sepihak. Inilah makna perikatan para pecinta filateli. Hal itu relevan dengan situasi saat ini.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa penting untuk membangun hubungan *people to people*, dari hati ke hati, seperti yang anda lakukan, melalui forum filatelis internasional ini. Bergerak melampaui impuls, kepentingan pribadi, dan fokus pada keuntungan murni. Ini yang kita butuhkan bersama," jelas Gobel dalam sambutannya di hadapan para filatelis, di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Minggu (7/8).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, di era digital saat ini, dunia bisa lebih terbantu dalam menghadapi pandemi Covid-19. Saat ini, dunia dihadapkan pada masalah yang akan terus menghantui, yaitu *climate change*. Gabungan semua hal itu membuat dunia dihadapkan pada keterbatasan suplai pangan. Bahkan bisa mengarah pada krisis pangan. Bahkan saat ini dunia juga dihadapkan pada melonjaknya harga energi dan suplai energi.

Dalam situasi ini, Indonesia harus fokus pada ekonomi pertanian, ekonomi maritim, energi baru dan terbarukan, ekonomi digital, dan penguatan UMKM. Di balik itu, semua adalah keharusan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dunia harus bergandengan tangan. Para negara-negara harus melepaskan ego masing-masing dan mengutamakan

kerja sama. "Dunia harus bekerja secara kolaboratif, melepaskan ego, dan memprioritaskan kerja bersama-sama. Meningkatkan tingkat kepercayaan, menciptakan persahabatan, dan membangun komunitas untuk mengatasi masalah," jelas legislator dapil Gorontalo tersebut.

Dalam acara ini, turut hadir Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, President Federation International Philately Mr. Bernard Beston, Duta Besar Qatar HE. Ms. Fouzia Idrees Salman Al Sulaiti, dan perwakilan dubes negara sahabat, serta para filatelis dari berbagai daerah. • **ssb/aha/sf**

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.



Scan QR untuk berita selengkapnya





Indonesia Juara Umum ASEAN Para Games 2022, Puan Maharani: Terima Kasih Pahlawan Olahraga

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengapresiasi para atlet disabilitas yang mampu membawa Indonesia keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Ia pun merasa bangga atas prestasi para atlet Indonesia. Indonesia menempati posisi puncak setelah merebut 426 medali dengan rincian 175 medali emas, 144 medali perak, dan 107 medali perunggu.

"Selamat atas keberhasilan tim Indonesia yang keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games 2022. Keberhasilan ini berkat kerja keras seluruh pihak yang terlibat hingga dapat mengharumkan nama bangsa," kata Puan, Senin (8/8).

Menurut Puan, seluruh atlet yang mengikuti ASEAN Para Games menjadi bukti penyandang disabilitas masih tetap bisa berprestasi. "Terima kasih kepada pahlawan olahraga yang telah kembali membawa Indonesia menjadi juara umum ASEAN Para Games. Termasuk juga bagi pelatih, official, dan volunteer yang membantu



FOTO: IST/NTV

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

atlet disabilitas berjuang demi nama baik Indonesia," ucap Puan.

Lebih lanjut, Puan berterima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya *multievent* olahraga bagi atlet disabilitas se-Asia Tenggara itu. Apresiasi juga diberikan kepada INASPOC selalu pelaksana, TNI/Polri, Satgas Penanganan Covid-19, dan seluruh instansi maupun pihak yang membantu penyelenggaraan event ini. "Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan ASEAN Para Games menjadi bukti bahwa negara memfasilitasi kegiatan olahraga dan prestasi bagi penyandang disabilitas," sebut Puan. • **tn/aha**



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- KETUA PENGARAH**
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)
- W.K PIMPINAN REDAKSI**
Wiryan Narendro Putro, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)
- REDAKTUR**
Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Sofyan Efendi
- REDAKTUR FOTO**
M. Andri Nurdiansyah
- SEKRETARIS REDAKSI**
Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
- ANGGOTA REDAKSI**
Rizka Arinindy, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzail, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianidi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balgays Maeshyntha, Anju Alfionco Sitompul, Zulfikar Mubien
- FOTOGRAFER**
Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Adhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen
- ANALIS MEDIA**
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciiani, Riska Ramadhani
- INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
- ADMINISTRASI**
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
- PENERBITAN**
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom
- IT MEDIA DIGITAL**
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Yudi Kresna
- ADMINISTRASI**
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kasus DBD Melonjak, Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Optimalkan Pelayanan Kesehatan

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan seiring dengan tingginya kasus demam berdarah *dengue* (DBD). Data Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes) menunjukkan, kasus DBD sampai pekan ke-30 tahun ini tercatat 68.903 kasus di 456 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan 640 kasus kematian. Bahkan pekan lalu, terjadi penambahan 1.311 kasus dan 13 kematian dalam seminggu.

"Saya dapat laporan kasus DBD minggu-minggu ini naik. Karena itu, saya minta pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang mengalami kasus DBD tinggi," kata Gus Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (10/8).

Gus Muhaimin menegaskan perlunya pemerintah pasang badan akan tingginya kasus tersebut, terutama terkait pelayanan untuk tes DBD, kesiapan tenaga medis, maupun kebutuhan obat-obatan DBD yang memadai. "Ini *warning* untuk pemerintah dan kita semua. DBD jangan diabaikan, apalagi ada kemiripan gejala awal pada

pasien DBD dengan pasien Covid-19, jadi saya kira perlu pendeteksian dini yang lebih cepat dan akurat," tegas Gus Muhaimin lebih lanjut.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mendorong Kemenkes serta Dinas Kesehatan untuk gencar melakukan upaya pencegahan penularan serta pengendalian peningkatan kasus DBD. Salah satunya dengan menggalakkan kembali kegiatan bersih-bersih dan melakukan *fogging* secara berkala, khususnya di wilayah padat pemukiman.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mendorong pemerintah untuk mengkampanyekan kembali gerakan

3M yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur benda yang bisa menampung air sebagai gerakan pola hidup sehat di tengah masyarakat. "Sosialisasi hidup sehat juga penting dilakukan secara masif. Pemerintah perlu gencar kampanye pengendalian DBD bagi masyarakat di kediaman masing-masing," terang legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII itu. ●gal/sf



Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.

FOTO: IST/ANL

Scan QR
untuk berita
selengkapnyanya



Sambut G20 dan P20, Fadli Zon Hadirkan Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dunia (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menghadirkan

Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia (World Stamp Championship and Exhibition Indonesia) dalam rangka menyambut puncak agenda G20 November 2022 dan P20 Oktober 2022 mendatang. Kegiatan ini, tambah Fadli, juga dalam rangka memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka dan 100 tahun usia perkumpulan filateli se-Indonesia.

"Adapun terdapat 61 negara yang berpartisipasi dalam acara ini dengan jumlah peserta lebih dari 500 dari berbagai negara, kemudian ada 2084 *frame* yang nanti akan kita lihat bersama-sama," ujar Fadli kepada **Parlementaria** di sela-sela menghadiri acara yang digelar di Hall C JIExpo, Kemayoran, Jakarta tersebut, Kamis (4/8).

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, acara tersebut adalah yang terbesar di masa pandemi, termasuk dihadiri oleh masyarakat filateli internasional. Termasuk dihadiri oleh Presiden Filateli Dunia dan beberapa presiden dari berbagai wilayah, seperti Asia Pasifik, Amerika, dan Afrika. Karena itu, Fadli mengajak generasi muda untuk menekuni ragam

masih memproduksi peranko dan memiliki kantor pos sebagai sarana untuk mengirim pesan secara tertulis (material). Termasuk, pranko yang diproduksi tersebut kini semakin variatif secara tampilan. Fadli menjelaskan, bahannya tidak hanya dari kertas, ada juga yang dari kayu, lempengan, multimedia, hologram, bahkan *Augmented Reality* (AR).

"Jadi, sangat bermacam-macam variasi dan inovasi (pranko) yang disesuaikan dengan perkembangan zaman," tutur Fadli yang juga Anggota Komisi I DPR RI tersebut.



FOTO: OI/NVI

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menghadiri Kompetisi dan Pameran Filateli Dunia di Kemayoran, Jakarta.

benda-benda filateli, yang seolah terlihat sudah tidak relevan dengan era kekinian.

"Tetapi sebenarnya justru semakin relevan. Karena ketika semua digital, hal-hal yang berbau material itu semakin jarang dan hal-hal yang material itu sebenarnya yang membuat kita selalu sadar bahwa ada keterkaitan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan," ujar Ketua Umum Perkumpulan Filatelis Indonesia tersebut.

Fadli menerangkan hampir semua negara di dunia saat ini

Diketahui, acara ini berlangsung pada 4-9 Agustus 2022 di Hall C2, JIExpo Kemayoran. Acara yang dibuka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan memperebutkan medali dan penghargaan khusus dalam 13 kelas koleksi filateli yang dipertandingkan. Juga sebanyak lebih dari 500 kolektor dari 65 negara anggota filateli dunia ikut bertanding di acara tersebut. Adapun pada Minggu (7/8), juga turut digelar Malam Penghargaan (Palmares Night) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. ●rdn,adi/sf

Scan QR untuk berita selengkapnya



Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, **Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan**

Kementerian Luar Negeri RI memastikan sekitar 300 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) di Taiwan dalam kondisi aman. Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau tersebut yang memicu kemarahan China. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di Taiwan, setelah meningkatnya ketegangan dengan China pasca-kunjungan tersebut.

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK (anak buah kapal) dan pekerja sektor lain," kata Christina dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Selasa (9/8).

Dia mengingatkan Kemlu untuk mematangkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di Taiwan. Langkah itu menurutnya sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya yaitu perwakilan

Anggota
Komisi I DPR RI
Christina Aryani.

”

TENTU PERLINDUNGAN WNI JADI FOKUS PERHATIAN KITA, APALAGI JUMLAH FANTASTIS TIGA RATUS RIBU (WNI)

Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

Karena itu dia menilai, Pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik. "Tentu perlindungan WNI jadi fokus

perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu (WNI) itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan," ujar Christina.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai munisipalitas di Taiwan. Selain itu menurutnya, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI. "Mereka ini tidak terdata, sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontingensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya. • **tn/aha**

FOTO: RUNI/NVL



Guspardi Gaus Minta Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU untuk Jalankan Tahapan Pemilu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Sebab ia menilai lembaga itu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

"Untuk dapat menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu, KPU sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp2,4 triliun. Dan pada 26 Juli 2022, Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun," ujar Guspardi, Selasa (2/8).

Artinya, lanjut Guspardi, masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah. Padahal menurut politisi PAN ini, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada 28 Juni lalu pun, dirinya sudah menyuarakan dan meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk segera mencairkan sisa anggaran KPU agar bisa diprioritaskan.

Sayangnya hingga saat ini, besaran

nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karenanya, legislator asal Sumatera Barat II ini berharap Kemenkeu dapat mempercepat realisasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU. Sebagaimana prioritas kebutuhan yang anggarannya telah disetujui oleh Komisi II DPR RI sebelumnya. Selain itu, masih kata Guspardi, pihaknya juga akan meminta dukungan koleganya sesama Anggota Badan Anggaran (Banggar DPR RI untuk meminta Menkeu Sri Mulyani agar anggaran KPU dapat segera dicairkan.

Hal itu semata demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU dan disetujui

oleh DPR beberapa waktu lalu. Meski demikian, Komisi II DPR RI juga meminta KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal. Sambil menunggu kekurangan anggaran bisa dicairkan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers yang diselenggarakan pada Jumat, 29 Juli 2022 lalu, sempat mengungkapkan bahwa Pencairan anggaran KPU macet di Kemenkeu. Padahal anggaran tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama DPR dan pemerintah. Dan KPU pun

membutuhkan anggaran itu untuk menempuh berbagai tahapan Pemilu yang sudah berlangsung sejak 14 Juni 2022 lalu. •
ayu/aha

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.



FOTO: ENO/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi III Apresiasi Kapolri Tetapkan Irjen FS Tersangka Kasus Brigadir J

Komisi III DPR RI mengapresiasi kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran Polri yang telah menetapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen FS sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Penjelasan Kapolri Jenderal Sigit dan jajaran mengenai kronologi dan peran para tersangka dalam penembakan Brigadir J dinilai transparan.

"Penjelasan Polri masuk akal dan sesuai harapan masyarakat. Saya sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI, dan saya yakin juga seluruh masyarakat Indonesia sangat memberikan apresiasi tinggi pada Kapolri dan tim," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dalam siaran pers yang diterima **Parlementaria**, Rabu (10/8).

Politisi Partai NasDem ini lebih lanjut menegaskan bahwa dirinya mendukung proses hukum Irjen FS dan deretan tersangka lainnya hingga proses persidangan. Hal tersebut, tandas Sahroni, sebagai momentum baik dan dukungan masyarakat untuk jajaran Polri.

"Penjelasan Kapolri dan Kabareskrim sangat terang benderang, tegas, dan tidak mencederai logika serta hati nurani masyarakat. Saya berharap proses hukum

yang bagus ini terus dilanjutkan sampai persidangan. Karena ini momentum yang sangat baik sekali untuk Polri," pungkas Sahroni lebih

”

MENDUKUNG PROSES HUKUM IRJEN FS DAN DERETAN TERSANGKA LAINNYA HINGGA PROSES PERSIDANGAN.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

lanjut.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir J. Eks Kadiv Propam Polri Irjen FS ditetapkan sebagai tersangka. "Timsus menetapkan Saudara FS sebagai tersangka," kata Kapolri saat konferensi pers di Mabes Polri beberapa waktu lalu.

• pun/aha



FOTO: JAKA/NWL

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: PUNTHO/NVL



Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Bengkulu dan Kepala BNNP Bengkulu beserta jajaran.

Komisi III: Revisi UU Narkotika Fokus Tindak Hukum Bandar

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengungkapkan revisi Undang-Undang (UU) Narkotika akan dikhususkan membuat suatu sistem baru terhadap penanganan narkotika yakni akan dipisahkan atau diberikan pemahaman secara tegas antara pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum. Khususnya terkait pendekatan hukum yang menjadi fokus dalam penegakan hukum adalah para bandar dan pengedar besar narkotika.

Demikian disampaikan Taufik usai menghadiri rapat dengar pendapat tim kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil

Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Bengkulu Irjen Pol. Agung Wicaksono dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu Supratman, beserta segenap jajaran yang digelar di Provinsi Bengkulu, Selasa (9/8).

"Jadi bukan pemakai (narkotika) yang barang buktinya 1 gram ke bawah dan sebagainya, jadi kalau 1 gram ke bawah ya sudah itu adalah pemakai dan kemudian direhabilitasi. Tetapi supaya fokus, maka penegakan hukum kita tujuan kepada pengedar dan bandar-bandar. Sehingga di Bengkulu ini misalnya, masih ada

jalur-jalur masuk bagi peredaran narkotika, maka konsentrasi (pemberantasan) ada di situ, sehingga yang fokus kita kejar penjahatnya dan bukan korban penyalahgunaan narkotika," ujarnya.

Oleh karena itulah, ungkap politisi Partai NasDem tersebut, maka Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Polda dan BNNP Bengkulu tersebut juga menyerap berbagai pandangan masukan agar dapat segera bisa diketahui sistem hukum mana saja dalam revisi UU Narkotika yang mendesak wajib diperbaiki serta diubah utamanya terkait dengan penentuan rehabilitasi bagi seorang pemakai.

"Apalagi, karena ada tim *assesment* terpadu yang ternyata di berbagai daerah termasuk di Provinsi Bengkulu ini hanya ada 2 BNNP di kota dan kabupaten saja sehingga tentu sedikit banyak akan menghambat proses ini. Nah itu akan kita jadikan bahan evaluasi serta akan menjadi salah satu konsentrasi Komisi III DPR RI ketika membahas revisi UU Narkotika," pungkas legislator dapil Lampung I tersebut. ● **pun/aha**

Komisi V Minta Evaluasi Berkala pada Pelayanan Jasa Aplikasi Ojek *Online*



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta adanya evaluasi berkala terhadap penerapan aturan baru kenaikan tarif ojek *online* (ojol). Khususnya, kata Lasarus, mengenai kualitas pelayanan yang diberikan pemberi jasa dan tanggung jawab perusahaan aplikasi ojek *online*. Dia pun memberikan perhatian pada kesejahteraan pengemudi ojol.

"Kesejahteraan para mitra pengemudi ojek *online* juga harus

menjadi komponen yang dievaluasi. Jangan sampai kenaikan biaya itu hanya menguntungkan perusahaan aplikasi, tapi hanya ada sedikit tambahan pemasukan untuk para pengemudi," ungkap Lasarus dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Rabu (10/8).

Lebih lanjut, dia meminta perusahaan aplikasi ojol konsisten menerapkan program jaminan kesejahteraan para mitra pengemudi untuk jangka panjang. Bukan hanya jaminan keselamatan bekerja,

tapi juga jaminan kesehatan dan kesejahteraan manakala mitra pengemudi sudah tidak lagi produktif bekerja. "Perusahaan aplikasi ojek *online* wajib memikirkan kesinambungan kesejahteraan para pengemudi kendaraan *online* di masa senjanya. Harus dipersiapkan sejak dini," tegas Lasarus.

Oleh karenanya, kata politisi PDI-Perjuangan itu, Komisi V DPR RI yang membidangi transportasi itu mengapresiasi perusahaan aplikasi ojek *online* yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi mitra pengemudi. "Sosialisasikan terus menerus agar mitra pengemudi dapat memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan sebaik-baiknya," ungkap Lasarus.

”

JANGAN SAMPAI KENAIKAN BIAYA ITU HANYA MENGUNTINGKAN PERUSAHAAN APLIKASI, TAPI HANYA ADA SEDIKIT TAMBAHAN PEMASUKAN UNTUK PARA PENGEMUDI,

Lasarus menambahkan, pengusaha aplikasi ojek *online* pun harus lebih memperhatikan layanan kesehatan bagi mitra pengemudi. "Saya melihat program BPJS Kesehatan untuk mitra pengemudi belum maksimal. Padahal profesi pengemudi cukup renta karena banyak berada di jalanan. Jadi program layanan kesehatan harus lebih dioptimalkan," tutup Lasarus. ● **ssb/aha**



Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) terhadap *regional development* Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh perusahaan BUMN yang harus berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8).

"Ada hal yang korelatif, terhadap *regional development* yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai *stakeholder* yang ada, terutama bagaimana

senyawa dengan renstra (rencana strategis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Aceh I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk daerah berjuduk Serambi Mekkah itu.

"BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, *wabil* khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh," tandasnya.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). "Progres pembangunan) KEK Arun ini masih *mandek-mandek*, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah *commit* dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum," ungkap legislator dapil Aceh II itu. • **ndy/sf**

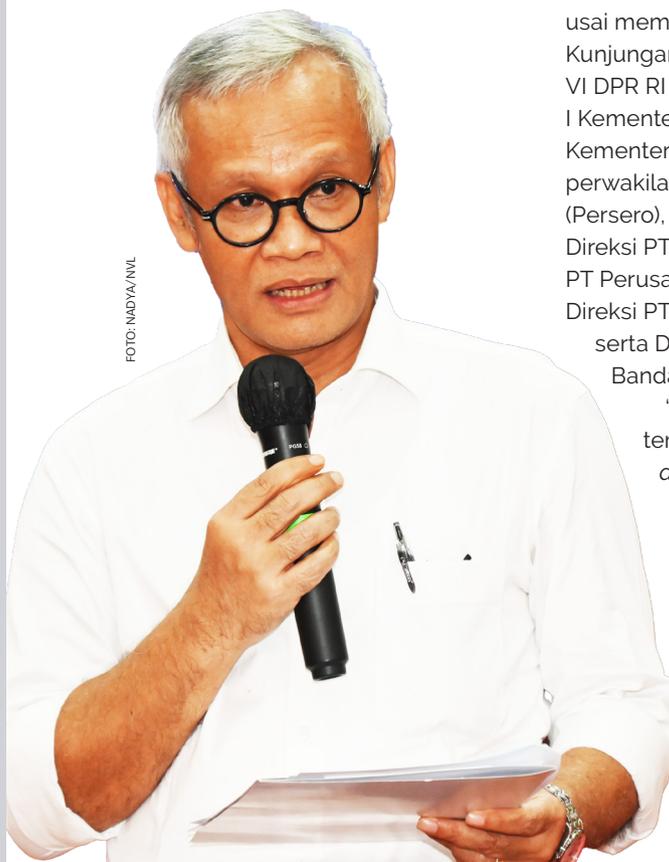


FOTO: NADYA/NVL

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Pentingnya Narasi Destinasi Wisata yang Kuat Bagi Pariwisata di NTT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendorong

adanya narasi untuk setiap destinasi wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berkaca pada tempat wisata luar negeri, narasi menjadi penting untuk

meningkatkan daya tarik wisatawan agar mau berwisata.

"Kelebihan tempat-tempat wisata di luar negeri itu punya narasi. Bayangkan stonehenge di Inggris cuma batu

bertumpuk-tumpuk itu yang datang luar biasa.

Padahal kalau kita lihat biasa saja. Tapi mereka punya narasi



Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung.

bahwa itu warisan megalitikum katanya," papar Martin dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja Komisi VI DPR RI, di Labuan Bajo, NTT, Senin (8/10).

Politisi Partai NasDem itu mencontohkan destinasi wisata di Indonesia yang sudah memiliki narasi adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Menurutnya, dunia sudah mengetahui histori bahwa Danau Toba itu terbentuk dari letusan Gunung Toba pada jutaan tahun silam.

"Jadi nanti kalau ada *event-event* besar yang Bapak buat, itu sebagai pemicu, nah narasi itu agar mereka kontinyu untuk mengunjungi tempat-tempat lainnya yang ada di sini. Kalau soal Komodo mungkin *story*-nya sudah ada, tapi semisal Pulau Padar dan lain sebagainya tolong itu dibuat narasinya," ujar Martin.

Selain itu, Martin juga menyoroti kinerja Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni, Martin menilai Pelni masih belum dinamis. "Seperti kapal ternak. Itu ternyata dari periode lalu dan masih satu. Padahal sebenarnya banyak sekali itu potensinya dan sayangnya itu sudah diambil swasta," terang Martin.

Martin meminta PT Pelni tidak terlalu kaku pada penyeberangan penumpang yang menjadi konvensional bisnis PT Pelni. Ia mendorong agar Pelni juga memperkuat pada bisnis kargonya. "Seperti ternak, sayur-mayur, itu kan banyak sekali dibutuhkan. Coba nanti didalami lagi seperti apa, kita sama-sama pelajari agar PT Pelni ini lebih dinamis dalam menyikapi dunia ekonomi sekarang," pesan Martin kepada direksi Pelni. ●eki/aha



FOTO: EKI/NVL

Komisi VI Dorong Pembangunan Digitalisasi Serta Pemberdayaan UMKM di Kaltara

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong pembangunan digitalisasi, layanan informasi dan komunikasi serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal tersebut diungkapkan Deddy saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan pejabat Eselon I Kementerian BUMN, pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan, serta jajaran Direksi BUMN, di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (8/8).

"Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Tarakan bersama perwakilan Kementerian Perdagangan, PT Telkomsel, PT BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) di Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mendukung pembangunan digitalisasi, layanan informasi dan komunikasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro," jelas Deddy.

Deddy menambahkan dengan meningkatnya harga komoditas akibat dari peningkatan tensi geopolitik global, mulai meningkatnya *domestic demand* seiring dengan kasus Covid-19 yang semakin melandai serta penurunan level PPKM, Inflasi Kaltara tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Selain itu, adanya beberapa kebijakan pemerintah dan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta



FOTO: OJI/NVI

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memimpin Kunker Komisi VI DPR RI ke Kaltara.

perayaan-perayaan seperti HUT Kaltara, festival budaya turut menjadi pendorong meningkatnya tekanan inflasi pada 2022.

"Terkait pembangunan digitalisasi, layanan informasi dan komunikasi, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Kalimantan Utara, Komisi VI DPR RI pada kunjungan kerja reses kali ini ingin mengetahui secara langsung terkait masukan, strategi, perkembangan kinerja, termasuk *roadmap* dan inovasi perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang," tandas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menegaskan bagaimana Telkomsel sebagai tulang punggung BUMN untuk digitalisasi sudah melakukan banyak hal dan ekspansi sehingga mampu memperluas akses masyarakat terhadap *market place* agar tidak dilindas oleh gempuran dari luar.

Khusus untuk Kaltara merupakan daerah perbatasan, terluar dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina. Sehingga Komisi VI DPR RI berharap dengan hadirnya perwakilan BUMN yang mengurus pembangunan digitalisasi usaha mikro dan ultra mikro di Kaltara bisa membawa dampak yang signifikan bagi rencana usaha ke depan.

"Negara harus hadir, kita sangat mengharapkan program digitalisasi usaha mikro dan ultra mikro mampu memberikan kontribusi pada potensi Kaltara yang sangat besar apakah itu hasil maritim (laut) bahkan sumber daya alam. Digitalisasi ini butuh fundamental yaitu konektivitas dimana dari 480 desa baru terkoneksi masih di bawah 300 desa belum sepenuhnya 4G sehingga kedepan kita dorong Telkomsel lebih ekspansif," imbuh legislator daerah pemilihan Kaltara ini. ● **oji/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Jaga Kebutuhan Energi Domestik, Krisis Batu Bara Harus Disikapi Serius

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, krisis batu bara di Tanah Air harus segera disikapi serius. Pasalnya, pemerintah sempat melarang ekspor batu bara untuk beberapa saat. Perlu diingatkan kembali bahwa Indonesia sudah memiliki *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Seperti kita ketahui di awal bulan Agustus 2022, ada beberapa pemberitaan penting yang perlu perhatian bersama, salah satunya adalah potensi terjadinya krisis energi primer khususnya batu bara bagi ketenagalistrikan kita dan juga industri lain," kata Sugeng saat

memimpin rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beserta jajaran Kementerian ESDM, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

Bahkan, kata Sugeng, di awal tahun ini pemerintah sempat menyetop ekspor batu bara walau hanya sesaat. Kini, Kementerian ESDM didesak untuk mengeluarkan kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan domestik energi primer tersebut. Rapat kerja ini pun menghasilkan kesimpulan, Komisi VII DPR RI mendesak KESDM merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk DMO batu bara. Pembentukan BLU ditujukan untuk mengatasi disparitas

harga yang tinggi antara pasar domestik dan luar negeri.

"Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI segera merealisasikan pembentukan BLU DMO batu bara untuk menyelesaikan permasalahan disparitas harga batu bara yang tinggi antara pasar domestik dan luar negeri," ucap politisi Partai Nasdem ini. Sugeng mengatakan, butuh regulasi yang bisa memayungi pembentukan BLU ini. Sehingga, pada rapat kerja tersebut disepakati bahwa payung hukumnya berupa Peraturan presiden (Perpres). Setelah Perpres nanti terbit, KESDM harus secepatnya membentuk BLU DMO batu bara tersebut. • **mh,adi/aha**



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Revisi Perpres BBM Bersubsidi Harus Tegaskan Kelompok Penerima

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo berharap Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur distribusi BBM bersubsidi bisa mempertegas kembali kelompok yang berhak menerima. Jenis BBM bersubsidi yang sedang jadi perbincangan publik adalah solar dan Peralite. Revisi Perpres BBM diserukan lebih jelas, agar biaya subsidi di APBN terkendali.

Menurutnya, masyarakat harus sadar bahwa BBM dan LPG subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. "Saat ini pemerintah sedang merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sudah seharusnya Revisi Perpres ini mengatur teknis kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Peralite," terang Sartono saat diwawancara *Parlementaria* lewat pesan teks, Kamis (4/8).

Produk Perpres yang jelas akan memudahkan kelompok masyarakat tidak mampu mengakses BBM bersubsidi. Legislator dapil Jawa Timur VII ini mengungkapkan, saat ini kelangkaan peralite dan solar terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ada keresahan di tengah masyarakat akibat langkanya Peralite dan solar.



Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo.

FOTO: OJI/NVL



PRODUK PERPRES YANG JELAS AKAN MEMUDAHKAN KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU MENGAKSES BBM BERSUBSIDI.

Ini tidak boleh dipandang remeh. Sartono menilai, pemerintah kurang mengantisipasi kelangkaan tersebut.

"Di dapil Jawa Timur VII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) kelangkaan solar sangat sering terjadi. Petani dan para pelaku UMKM sangat membutuhkan solar untuk memproduksi. Jadi, saat solar langka, otomatis produksi akan terhenti," tutur politisi Partai Demokrat tersebut.

Pada bagian lain, Sartono juga melihat, kelangkaan dan tingginya harga BBM di Tanah Air tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini. Harga minyak dunia naik signifikan hingga 350 persen dari April 2020 hingga April 2022. "Meski mengalami dinamika, namun harga minyak mentah terus berada pada level tinggi, di atas 100 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas energi ini tentu berpengaruh terhadap inflasi dan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi," kata Sartono.

Seraya menambahkan, tren konsumsi BBM masyarakat terus meningkat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19, termasuk peningkatan konsumsi Peralite. "Tren kenaikan konsumsi Peralite disebabkan migrasi pengguna Pertamina akibat kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut," tutup Sartono. • mh/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Kementerian Sosial (Kemensos) membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Patalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

"Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan

ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem *monitoring*," ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. "Sejak awal, kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es.

Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap," kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

"Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka *enggak* punya kewenangan kan menjadi lambat," kata Nurhuda.

• rnm/aha

Wakil Ketua Komisi VIII
DPR RI Diah Pitaloka.



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: JAKA/NVL

Komisi IX Nilai **LTSA** **Batam** untuk **Perizinan PMI** Belum **Berjalan Optimal**

berbagai pihak untuk memastikan PMI yang berangkat bekerja ke luar negeri telah sesuai prosedur. Mengingat masyarakat yang keluar dari daerah dan bekerja di luar negeri seharusnya memiliki izin, sehingga memiliki semacam 'surat jalan' yang legal dari Kemnaker, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Felly mengingatkan, jangan sampai PMI berangkat secara ilegal dari Batam menuju negara tetangga melalui jalan dan pelabuhan tikus yang

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI mendapat informasi, kerap terjadinya pengiriman Pekerja

Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal ke luar negeri melalui Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan, PMI ini bukan hanya berasal dari Kepri saja, melainkan dari sejumlah wilayah Indonesia. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menduga persoalan ini terjadi karena tidak optimalnya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ada di Batam, guna melayani perizinan PMI yang hendak ke luar negeri. Sehingga hal ini menyulitkan PMI yang hendak mengurus perizinan bekerja.

Demikian diungkapkan Felly saat memimpin rapat Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Sekda Kepri, Kadis Kesehatan Kepri, Kadisnakertrans Kepri, Kepala Balai POM Batam, Kepala BKKBN Kepri, perwakilan Pemkot Batam, Kepala UPT BLK Kepri, Kepala UPT BP2MI Kepri, dan Kepala UPTD BLK Batam, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Divisi Regional II, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbar-Riau, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Batam, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam, Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Kepala KKP Kelas I Batam,



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Kepri.

dan Kepala BTKLLP Kelas I Batam, di Batam, Kepri, Senin (8/8).

"Bicara persoalan (penanganan) tenaga kerja (di Batam), seakan-akan diam di tempat. Sementara kita juga tahu bersama, persoalan Layanan Satu Atap Terpadu (LTSA) tidak semuanya lengkap. Jadi mereka (PMI) mungkin ada yang *pengen* urus sesuai jalur yang sebagaimana mestinya, tapi ketika datang (ke LTSA), tidak ada petugas, atau petugas yang satu ada, yang satu tidak. Jadi artinya pelayanan LTSA (di Batam) boleh dibilang belum maksimal. Kalau bicara Pekerja Migran Indonesia, memang menjadi persoalan yang memang perlu diseriusi oleh pemerintah. Jadi pemerintah pusat sampai daerah perlu serius," jelas Felly.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, perlunya koordinasi

dibantu oknum tidak bertanggung jawab, dan ketika nanti di negara tujuan mengalami masalah, pemerintah harus turun tangan.

"*Enggak* mungkin mereka (PMI berangkat) keluar negeri sendiri. Itu kan pasti ada oknum-oknum yang mem-*backup* mereka. Nah siapa yang tanggung jawab? Siapa yang harus awasi mereka? Marilah bekerja sama kalau memang serius untuk menangani PMI. Nah ini yang kita perlu renungkan bersama, kemudian kita perlu mengambil kebijakan seperti apa. Sekali lagi tujuannya bagaimana melindungi warga kita yang ada di luar (negeri). Jangan nanti mereka sudah jadi korban, (pemerintah) baru datang. Kan kita tahu, sudah berapa banyak (WNI) terlantar di negara orang," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara tersebut. ● **sf**

FOTO: SOPYAN/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi IX Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19 Kabupaten Sambas



Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI ke Sambas.

Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin memberikan apresiasi atas langkah jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat terkait penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Sambas yang dinilai baik. Diketahui, pada 2 Agustus 2022 lalu, Sambas menembus angka 3.946 kasus orang yang terinfeksi positif Covid-19, dengan angka kematian hingga 38 orang. Sementara 4 orang masih dirawat dan 3.904 dinyatakan sembuh.

"Saya memberikan apresiasi kepada seluruh upaya Pemerintah, yakni Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas

Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat, dan seluruh pihak yang

”

KABUPATEN SAMBAS TELAH MEMBERIKAN OPTIMISME DENGAN ADANYA PENURUNAN KASUS YANG TERUS STABIL. KARENA ITU, KAMI (KOMISI IX DPR RI) JUGA MENDUKUNG PENUH BERBAGAI STRATEGI PENANGANAN PANDEMI

turut serta bahu membahu dalam penanganan pandemi Covid-19," jelas Alifuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sambas dan mitra kerja terkait, di Sambas, Kalbar, Senin (8/8).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai upaya tersebut adalah sebuah kerja keras yang sangat perlu Komisi IX DPR RI apresiasi bersama. "Melihat hal tersebut, Kabupaten Sambas telah memberikan optimisme dengan adanya penurunan kasus yang terus stabil. Karena itu, kami (Komisi IX DPR RI) juga mendukung penuh berbagai strategi penanganan pandemi yang saat ini dijalankan, termasuk percepatan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19," ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I tersebut.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto juga mengatakan kondisi Covid-19 di Kalbar secara umum sudah terkendali dengan baik. "Seperti yang sudah disampaikan oleh Bupati Sambas, (penanganan Covid-19 di Sambas) sudah bagus dan terkendali dengan baik. Sebagai kabupaten lintas batas negara kan memang standar yang paling penting adalah mencegah migrasi virus antara dua negara ini (Indonesia dan Malaysia) yang justru menjadi titik poinnya. Sudah bagus saya kira," tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Sambas dalam rangka mendapatkan masukan secara langsung dari pemerintah daerah, mitra kerja, hingga masyarakat. Dengan tujuan, untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI, utamanya di masa ketika Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. • hnm/sf



Andreas Hugo Pareira: **Upayakan Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wisata Labuan Bajo**

Labuan Bajo dikenal sebagai destinasi yang menjadi tujuan turis asing. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan Bajo banyak mengandalkan wisatawan lokal, khususnya dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19. Saat ini terjadi sengketa pengelolaan industri wisata di Labuan Bajo, atas kejadian ini Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira akan mengupayakan penyelesaian sengketa antarpihak yang berkepentingan.

"Saya sebagai Anggota Komisi X yang membidangi pariwisata dan wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada masa sidang yang akan datang," papar Andreas dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Rabu (3/8).

Andreas menyebut, pelaku wisata di Labuan Bajo telah memahami bahwa konservasi penting

untuk keberlanjutan Komodo. Ia mengatakan, faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT.

"Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT

kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata," tutur Andreas.

Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo hingga aksi demo yang berujung kekisruhan di Labuan Bajo pun menjadi perhatian dunia internasional. Komisi X DPR RI mendorong agar pemerintah bersama para *stakeholder* untuk segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo buntut kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo.

"Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan *negative campaign* untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung," tegas Andreas. DPR RI berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Andreas juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan masyarakat. • **ssb/aha**

Anggota Komisi X DPR RI
Andreas Hugo Pareira.



FOTO: DEVI/NVL

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pemerintah Perlu Percepat Realisasi Anggaran PC-PEN Guna Mitigasi Risiko Inflasi



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: DEVI/NVL

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mendesak pemerintah untuk mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Realisasi anggaran tersebut diprioritaskan terutama untuk menjamin pasokan bahan pangan yang mencukupi, murah, dan mudah diakses. Lalu, menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi bantuan sosial (bansos) secara tepat dan cepat.

"Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang hingga 22 Juli 2022 baru mencapai Rp146,7 triliun atau 32,2 persen dari pagu yang dialokasikan yakni Rp455,6 triliun," kata politisi yang kerap disapa Hergun itu, Jumat (5/8).

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis tingkat inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64 persen (mom) dan 4,94 persen (yoy). Tingkat inflasi secara tahunan merupakan inflasi tertinggi sejak Oktober 2015 yang mencapai 6,25 persen. Karena itu, Hergun mendorong pemerintah dan Bank Indonesia agar memperkuat koordinasi untuk mengatasi merambatnya inflasi.

Bauran antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diyakini

akan mampu mempertahankan tingkat inflasi pada rentang yang moderat dan terukur. Idealnya, kata Hergun, pada periode Semester I-2022 realisasi PC-PEN sudah mencapai 50 persen, sehingga pada Semester II tidak menumpuk. Masih rendahnya realisasi PEN dikhawatirkan akan mengulang realisasi tahun lalu yang tidak optimal, yakni hanya 88,4 persen.

"Realisasi PC-PEN perlu lebih didorong agar terserap lebih optimal, terutama program perlindungan sosial karena akan dijadikan bantalan untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah," tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Hergun juga mengingatkan, sejatinya tingkat inflasi yang hampir menyentuh angka 5 persen sudah melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2022 yaitu pada rentang 2 persen hingga 4 persen. Namun, menurutnya, Bank Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam bila ingin menaikkan

suku bunga. Hal tersebut mengingat tingkat inflasi Indonesia yang masih lebih rendah dibanding negara-negara maju yang sudah menaikkan suku bunganya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Inggris juga sudah mencapai pada titik optimal pasca terpukul saat pandemi Covid-19. Ia menyimpulkan, tingginya pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut mengerek naik tingkat inflasi dari sisi permintaan. Keadaan diperparah dengan terganggunya rantai pasok sehingga mengerek inflasi dari sisi penawaran.

"Berbeda dengan Indonesia yang pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya tercapai pada level 7,16 persen pada kuartal II 2021. Sehingga bagi Indonesia masih perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui suku bunga bank sentral yang rendah," tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV tersebut. • rdn/sf

Pertumbuhan Kuartal II 2022 Modal Penting Hadapi Tekanan Eksternal

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 di level 5,44 persen (year on year/yoy). Sehingga, lanjut Said, selama 1 semester di tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi akumulatif Indonesia mencapai 5,23 persen. Menurutnya, hal itu terlihat

dari sektor industri yang mulai bangkit paska pandemi yang tumbuh 4 persen (yoy).

Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy), pada sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 21,27 persen (yoy) dan kemudian pada sektor perdagangan, hotel, restoran, listrik dan gas semuanya tumbuh fantastis hingga mencapai 9 persen (yoy).

"Sektor-sektor ini kembali bergerak kembali karena keberhasilan kita mengendalikan pandemi Covid-19. Sehingga mobilitas masyarakat pulih seperti sebelum pandemi. Tekanan eksternal yang sejak perang Ukraina dan Rusia pecah pada akhir Februari 2022 terlihat masih terkelola dan termitigasi dengan

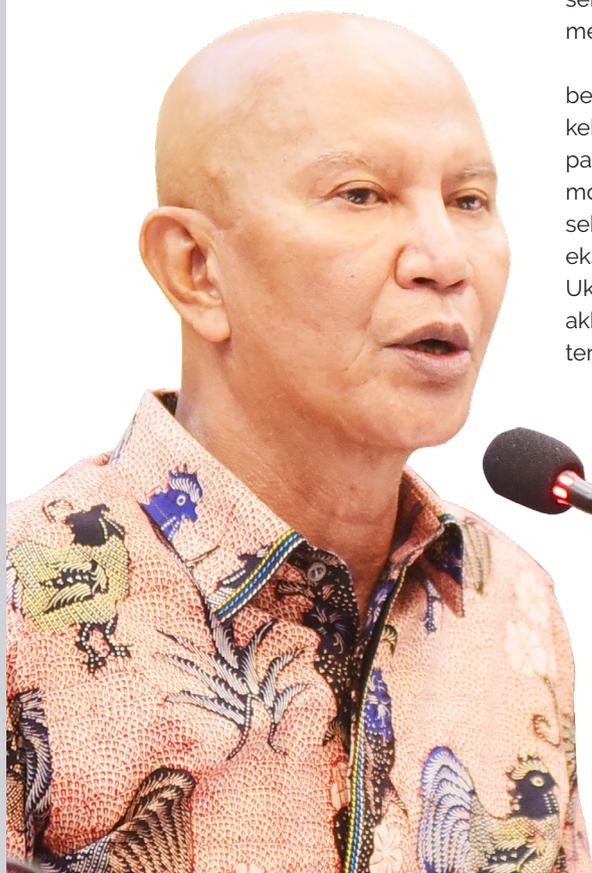
baik oleh pemerintah," ungkap Said melalui keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Sabtu (6/8).

Meskipun sedikit ada kenaikan inflasi, yakni di level 4,4 persen, namun lanjut Said, hal tersebut masih terkendali. "Inflasi dan pandemi yang sama sama terkendali membuat tingkat permintaan yang bertumpu pada konsumsi domestik, yakni pada rumah tangga tumbuh sangat baik di level 5,5 persen (yoy)," jelasnya.

Masih kata politisi PDI-Perjuangan itu, investasi juga menunjukkan prestasi yang menggembirakan ditengah kecenderungan investor memlihi jalan konservatif, menempatkan investasi mereka di *asset haven*. Pertumbuhan konsumsi barang modal mencapai 3,07 persen (yoy). Selain itu kenaikan harga komoditas ekspor telah mendorong permintaan keluar lebih baik. Ekspor kita tumbuh 19,74 persen (yoy).

"Konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor yang tumbuh sangat baik telah menjadi lokomotif permintaan (demand) ke berbagai lapangan usaha. Capaian kita di Kuartal II 2022 ini modal sangat baik menghadapi situasi ke depan yang tampaknya masih akan menghadapi tingginya harga komoditas. Saya berharap ada beberapa hal yang perlu terus menjadi fokus perhatian kita ke depan," jelas Said.

Di antaranya, mengupayakan semaksimal mungkin inflasi dan pandemi Covid-19 terkendali. "Memang harganya tidak murah, ongkos APBN 2022 sangat besar untuk menjaga daya beli rumah tangga, khususnya pada sektor makanan, dan transportasi sebagai *core inflasi*. Namun sejak awal APBN kita rancang sebagai *shock absorber* menghadapi tekanan eksternal, dan ancaman laten pandemi," kata legislator dapil Jawa Timur XI tersebut. • **rnm/sf**



Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

FOTO: JAKA/NVL

Scan QR untuk berita selengkapnya



Persiapkan Sidang Tahunan 2022, Biro Protokol dan Humas Setjen DPR Gelar *Briefing* Keprotokolan



Plt. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini saat memimpin *briefing* Keprotokolan terkait pelaksanaan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama pada 16 Agustus 2022 mendatang.

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar *Briefing* Keprotokolan terkait pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Pidato Presiden Penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada 16 Agustus 2022 mendatang. Rapat teknis penugasan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/8).

"Tak terasa kita tinggal menghitung hari, 16 Agustus sudah di depan mata kita. Kita senantiasa berkomitmen mudah-mudahan apa yang sudah ditugaskan kepada kita semua dapat dilaksanakan dengan baik dan kita berharap pelaksanaan sidang 16 Agustus sampai dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap teman-teman yang bertugas, tadi sudah ditempatkan pada pos masing-masing ini dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik," ujar Plt. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini.

Sebelumnya, Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat Setjen DPR RI Suratna membacakan nama-nama petugas yang akan terlibat beserta pos yang akan ditempati dalam gelaran akbar tersebut. Selain itu dijabarkan juga jadwal dan tahapan pelaksanaan sebagai gambaran bagi pihak-pihak yang akan bertugas. Selain pembagian tugas, dibahas pula hal-hal teknis seperti kewajiban PCR bagi siapa saja yang akan memasuki ruang sidang utama di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara.

Pada acara tersebut, Suratna juga menegaskan bahwa rangkaian Sidang Tahunan 2022 akan diselenggarakan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Sidang Tahunan kali ini akan kembali dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota dewan, pimpinan lembaga negara serta tamu undangan, setelah pada Sidang Tahunan 2021 yang lalu dilakukan secara terbatas dengan hanya dihadiri oleh 60 orang.

"Jadi memang kegiatan Sidang Tahunan, Sidang Bersama dan Sidang APBN tahun 2022 agak berbeda dengan sidang tahun sebelumnya. Kalau dulu kehadiran tamu-tamu undangan hanya sekitar 60, sekarang sudah 969 hampir 85 persen dari kapasitas ruangan, sehingga kami memastikan bahwa seluruh tamu undangan ini harus menjaga protokol kesehatan. Harus PCR 2x24 Jam," jelas Suratna kepada **Parlementaria**.

Suratna juga mengungkapkan bahwa untuk masalah keamanan, telah dilakukan koordinasi dengan pihak Paspampres, termasuk untuk membatasi mobilitas pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dijelaskan, pembatasan juga dilakukan kepada ajudan atau ADC dari Kementerian dan Lembaga, sehingga seluruh kegiatan pendampingan di Gedung Nusantara akan dikoordinasikan oleh pihak Protokol DPR RI. ● **uc/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Dimiyati Natakusumah Ajak Media Tingkatkan Kolaborasi Wujudkan Parlemen Modern



FOTO: JAKA/NVL

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah bertukar cenderamata saat acara Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Lombok, NTB.

DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan Parlemen Modern. Banyak cara yang sudah dilakukan salah satunya adalah dengan memperkuat kolaborasi dengan para jurnalis, terutama yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dalam mempublikasikan kinerja kedewanan.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengatakan, dalam mewujudkan cita-cita menjadi Parlemen Modern, bukanlah pekerjaan Anggota DPR semata. Selain Sekretariat Jenderal DPR, awak media juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam

mewujudkan lembaga legislatif yang modern dan transparan.

"Ibarat sebuah tim sepakbola yang terdiri dari kiper, bek, gelandang, striker, juga butuh dukungan dari *supporter*. Begitu pula DPR RI, butuh dukungan dari media untuk memperkuat kinerjanya mewujudkan parlemen modern," ucap Dimiyati usai membuka diskusi Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (5/8). Turut hadir, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, pejabat dan staf di lingkungan Setjen DPR RI, serta pengurus dan anggota KWP.

Dalam forum diskusi yang mengangkat tema "Perkuat Kolaborasi Media dan Parlemen

Wujudkan Parlemen Modern" ini, Dimiyati mengajak KWP untuk meningkatkan kolaborasi membangun opini publik yang positif terkait kinerja kedewanan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyajikan berita-berita positif yang dilakukan para wakil rakyat demi kepentingan masyarakat luas.

"Jika media membuat strategi komunikasi publik yang baik, ketika ada pihak-pihak yang beropini buruk terhadap DPR, dapat segera diredam agar tidak menjadi citra negatif. Kita tidak boleh kalah dengan para jurnalis di lembaga eksekutif maupun yudikatif," pesan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. ● **es/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
MENGUCAPKAN

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2022



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT

